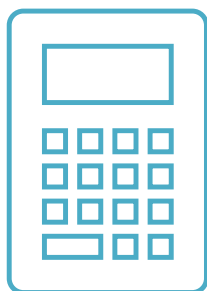




Tahun Anggaran 2026

Rencana Kerja (RENJA)

BPPKAD-TA.2026



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPPKAD Tahun 2026 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

PROBOLINGGO, 21 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19730215 199302 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.3.1 Maksud 3

1.3.2 Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKAD..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 22

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 26

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT BPPKAD..... 43

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 59

BAB V PENUTUP 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD
dan7

Tabel 2 - Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah –
BPPKAD Kabupate Probolinggo23

Tabel 3 - TABEL T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Probolinggo27

Tabel 4 - TABEL T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Probolinggo.....42

Tabel 5 - Tabel 3.2.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Serta Target Kinerja Bppkad
Tahun 2025 s/ d 2029.....44

Tabel 6 - TABEL T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2026.....46

Tabel 7 - TABEL Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan BPPKAD Tahun 2026.....59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disesuaikan pada pertengahan tahun anggaran berjalan guna mengoptimalkan pencapaian target tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama BPPKAD, dengan memperhatikan perubahan kondisi yang terjadi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk evaluasi kinerja pelaksanaan Renja sebelumnya, perubahan prioritas pembangunan, serta perubahan kebijakan dan peraturan yang relevan. Kondisi internal (misalnya sumber daya manusia, anggaran) dan eksternal (misalnya ekonomi, sosial, lingkungan) dapat mengalami perubahan. Renja Perubahan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Renja Perubahan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah. Ini dapat dicapai melalui penyesuaian yang tepat pada program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2023 Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

- a. Dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD.
- b. Penjabaran lebih operasional dari Renstra BPPKAD, agar visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat diterjemahkan dalam rencana kerja yang terukur tiap tahunnya.
- c. Pedoman pelaksanaan pembangunan bidang keuangan daerah yang memuat target kinerja dan pagu indikatif, sehingga menjadi acuan bagi pelaksanaan APBD.
- d. Instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang nantinya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) BPPKAD tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan antara perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD/RPJPD Kabupaten, RKPD, dan Renstra).
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan BPPKAD yang mendukung peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien.
- c. Mengoptimalkan alokasi sumber daya (dana, aparatur, sarana prasarana) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menjadi pedoman kerja tahunan bagi seluruh bidang di BPPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- e. Sebagai dasar pengukuran kinerja melalui indikator yang jelas, sehingga dapat dievaluasi capaian target Renstra BPPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 BPPKAD Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari

- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan,
- 1.4 dan sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun lalu 2026 sampai dengan Triwulan II (Juni 2026) analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Kerja dan pendanaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPPKAD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKAD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Keuangan BPPKAD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dari rata-rata indikator capaian kinerja sampai dengan triwulan II tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo masih belum mencapai target maksimal, karena beberapa pelaksanaan kegiatan ada di triwulan 3 dan 4 tahun anggaran 2025.

Rincian realisasi program/kegiatan BPPKAD dapat dilihat pada format tabel berikut ini:

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPPKAD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BPPKAD S/D TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN PROBOLINGGO

BPPKAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Bppkad Tahun N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bppkad S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Bppkad Tahun (N-2)	Realisasi Renja Bppkad Tahun (N-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegitan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1)	Tingkat Capaian Ralisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10)	11=10/9*100
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	100%	248.32	100%	50%	50%	1%	50.00%	50%

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100%	93.91%	100%	82%	82%	100%	50.00%	0,5%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	4	0,5%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3Dokumen	100%	3 Dokumen	2	0,6%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 lapsoran	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	6	0,5%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100%	100%	100%	17%	17%	100%	50.00%	50%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	220.00	77 org	71 org	93.4%	75 Orang	75	1%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	0	0	0	0	0%	12 Laporan	4	0,3%

	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	260.00%	100%	55%	55%	1%	0%	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	127 paket		127 paket	0	0%	90 Paket	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 org	26 org	14 org	10 org	71.4%	24 Orang	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100%	83%	100%	24%	24%	1%	50.00%	50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	0 paket	17 paket	0 paket	0%	17 Paket	0%	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 paket	10 paket	17 paket	6 paket	35.2%	17 Paket	71,93	4,2%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	13 paket	0 paket	13 paket	0 paket	0%	13 Paket	0	0

		Disediakan								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	12 paket	10 paket	2 paket	20%	10 Paket	40	4%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	1 paket	8 paket	2 paket	25%	8 Paket	30	3,7%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 laporan	100 laporan	14 laporan	2 laporan	14.2%	14 Laporan	40	2,8%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 laporan	19.40 laporan	114 laporan	75 laporan	65.7%	114 Laporan	27	23,6
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1.00	0	0	0%	1 Dokumen	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	22.56%	100 %	32%	32%	1%	74,88%	7,4
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	6 unit	3 unit	3 unit	100%	3 Unit	1	33,3

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0%	3 Unit	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	12 unit	2 unit		0%	2 Unit	70,65	35,3
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		1 unit	0 unit	0%	1 Unit	72,33	72,3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	94.00%	100 %	26 %	26%	1%	36,96%	3,6
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3 laporan	25%	12 Laporan	50	4,1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	8 laporan	3 laporan	37.5%	12 Laaporan	5	41,6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	12 laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	37,3	4,6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	100 %	60.16%	100 %	48 %	48%	1%	33,5%	3,3

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	20 unit	31 unit	31 unit	100%	31 Unit	16	51,6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	10 unit	8 unit	8 unit	100%	8 Unit	6	75
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	18 unit	14 unit	14 unit	100%	14 Unit	12	85,7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 Unit	2	2
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (dimensi 2, 3 dan 4 IPKD)	46.7	87%	46.7	25.00%	53.5%	1%	0%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD (tepat	100%	100 %	100%	25%	25%	100%	0%	0%

	Anggaran Daerah	waktu)								
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 Dokumen	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	500%	2 Dokumen	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 Dokumen	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	4 Dokumen	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	20%	5 Dokumen	1	20

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan APBD	94.1%	94 %	94.1 %	39%	41.4%	94.2%	41,50%	44,0
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	4.00	12 dokumen	5 dokumen	41.6%	12 Dokumen	4	33,3
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220 dokumen	220 dokumen	220 dokumen	60 dokumen	27.2%	220 Dokumen	53	24,0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan		2 laporan	1 laporan	50%	2 Laporan	1	50

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	120	130 dokumen	50 dokumen	38.4%	12 Dokumen	3	25
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 dokumen	4	3 dokumen	1 dokumen	33.3%	3 Dokumen	1	9,0
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162 org	0	1	0 org	0%	162 Orang	54	33,3
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100%	106%	100%	25.00%	25%	100%	55.00%	55
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	87 dokumen	55 dokumen	87 dokumen	22 dokumen	25.2%	87 Dokumen	87	100%

	LO dan Beban	Pendapatan-LO, dan Beban								
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	2 Laporan	0	0
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6 laporan	6 laporan	6 laporan	1 laporan	16.6%	6 Laporan	6	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	20%	10 Dokumen	7	70
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100%	141%	100%	25%	25%	100%	50.00%	50

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325 laporan	325 laporan	325 laporan	-	0%	325	38	11,6
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	12 laporan	1 laporan	-	0%	1	2	2
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	325 laporan	1 laporan	-	0%	1	12	12
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Prosentase SKPD Yang Tertib Pengelolaan BMD Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	80%	80%	80%	25%	31.2%	84%	50.00%	0,59
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Prosentase SKPD Yang Tertib Pengelolaan BMD Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	80%	80%	80%	25%	31.2%	84%	50.00%	0,59
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	1 Dokumen	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87 dokumen	176 dokumen	87 dokumen	37 dokumen	42.5%	87	87	100%

	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87 laporan	5.2 laporan	261 laporan	66 laporan	25.2%	261	87	33,3
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87 laporan	88 laporan	87 laporan	0 laporan	0%	87	87 Laporan	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	55 laporan	40 OPD	500 laporan	100 laporan	20%	500	275	55
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 laporan	4 OPD	4 laporan	1 laporan	6.2%	4	2 Laporan	50
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	20 OPD	6 dokumen	1 dokumen	16.6%	6	3 Dokumen	50
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1 %	4 %	1 .3%	0.29%	22.3%	1.4%	46.01%	3,2

	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1 %	4%	1 .3%	0.29 %	22.3%	1.4%	46.01%	3,2
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 unit	5.00 Paket	12 unit	2 unit	16.6%	13	3 Unit	23,0
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	503 laporan	1.00 laporan	503 laporan	103 laporan	20.4%	503	201	39,9
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	52 objek pajak	444428.36	52 obyek pajak	7 obyek pajak	13.4%	52	18	34,6
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5002 dokumen	1 dokumen	5002 dokumen	0 dokumen	0%	5000	2000	40
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	1.00	12 layanan	4 layanan	33.3%	12	3	25
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5002 dokumen	10.10	5002 dokumen	502 dokumen	10.0%	5000	2000	40

	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	102 dokumen	1.00 dokumen	102 dokumen	17 dokumen	16.6%	102	40	39,2
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	47 laporan	1.00 laporan	47 dokumen	17 dokumen	36.7%	47	18	38,2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPPKAD Kabupaten Probolinggo

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Seluruh indikator administrasi dan dukungan kelembagaan menunjukkan capaian 100%.Penyusunan SAKIP, dokumen perencanaan, dokumen RKA, laporan capaian kinerja, administrasi keuangan, serta administrasi kepegawaian tersusun dengan kualitas penuh.Kegiatan penunjang seperti pengadaan pakaian dinas, pelatihan pegawai, penyediaan logistik kantor, barang cetakan, fasilitas tamu, rapat koordinasi, arsip dinamis, jasa komunikasi, surat-menyurat, serta pemeliharaan aset penunjang semuanya terealisasi sesuai target.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) stabil di kisaran 45,3–48,0 dengan capaian 100% target.Penyusunan APBD, P-APBD, KUA-PPAS, regulasi anggaran, dokumen teknis, hingga pertanggungjawaban APBD seluruhnya diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100%.Realisasi penyerapan APBD berada di angka tinggi (94,1% hingga 98,99%), menunjukkan kredibilitas dan efektivitas perencanaan.Seluruh aktivitas perbendaharaan, akuntansi, rekonsiliasi data, konsolidasi laporan SKPD/BLUD, hingga pengelolaan kas daerah tercapai penuh 100%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Target keteraturan pengelolaan BMD oleh SKPD tercapai, naik dari 80% ke 82%.Kegiatan standarisasi harga, perencanaan kebutuhan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, serta optimalisasi pemanfaatan dan penghapusan aset semuanya tercapai penuh 100%.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target peningkatan pajak daerah 1% per tahun tercapai, dengan realisasi antara 1,16% hingga 1,3%.Fasilitas pengelolaan pajak, pemeliharaan basis data, penyesuaian NJOP, penetapan wajib pajak, konsultasi, verifikasi data, penagihan, hingga pembinaan retribusi daerah semua terealisasi 100%.

Kesimpulan :

Capaian rata-rata 100% pada hampir semua program dan kegiatan, baik administratif, keuangan, aset, maupun pendapatan daerah.

Kinerja unggul ditunjukkan pada ketepatan waktu penyusunan APBD, penyerapan APBD, pengelolaan kas, serta pemeliharaan aset daerah.

Peningkatan PAD meskipun masih relatif kecil, tetap menunjukkan tren positif dan pengelolaan yang kredibel.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas, inovasi, dan kontribusi kinerja fiskal agar tidak hanya kuantitatif 100% capaian, tetapi juga lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pembangunan daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH – BPPKAD
KABUPATE PROBOLINGGO

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%)	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	
3	Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Prosentase Penyerapan Anggaran (%)	-	-	93	93	93	93	93	93	93	93	
5	Fleksibilitas Keuangan (%)	-	-	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	
6	Solvabilitas Operasional (%)	-	-	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	
7	Persentase Penilaian Opini BPK (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Solvabilitas Jangka Panjang (%)	-	-	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	
9	Solvabilitas Layanan (Rp/org)	-	-	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	
10	Solvabilitas Jangka Pendek (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%)	-	-	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	

Pencapaian kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan peraturan tersebut, BPPKAD Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024 memiliki indikator dan target kinerja yang berbeda. Sehingga Perubahan tersebut berimbas kepada RENSTRA OPD.

Dari tabel capaian kinerja utama BPPKAD sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025 diatas, dapat dijelaskan sbb ;

1. **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan indikator sbb;**

a. **Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

Target Kinerja pada indikator kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran membandingkan kesesuaian program dan anggaran di RPJMD, RKPD, KUAPPAS dan APBD. Pencapaian pada indikator ini 100 %

b. **Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD**

Target kinerja pada indikator pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebesar 20 (indek). Pencapaian sd triwulan II mencapai 15 (Indek) atau sebesar 75%. Capaian tidak mencapai 100% karena alokasi APBD untuk bidang infrastruktur belum mencapai 40% dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

c. **Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indek transparansi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar 13.45 (indek) per tahun. Pencapaian sd triwulan II mencapai 6.21 (Indek) atau sebesar 46.15%. Pencapaian ini masih belum maksimal, karena dokumen pengelolaan keuangan sebanyak 29 dokumen belum semua di publikasikan. Dokumen yang belum di publikasikan adalah dokumen tentang Laporan realisasi pengelolaan keuangan daerah yang terbit ditahun berikutnya sesuai pemeriksaan oleh BPK.

d. **Indek Penyerapan Anggaran APBD:**

Indek penyerapan anggaran APBD dengan target sebesar 17.14 (indek). Pencapaian sd triwulan II mencapai 4.44 (Indek) atau sebesar 25.93%. Indikator kinerja ini menghitung 9 rekening belanja yang sudah mencapai realisasi 80% dari target anggarannya.

e. **Indek Fleksibilitas Keuangan.**

Indek fleksibilitas keuangan dengan target sebesar 2.20 (indek) per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar 2.10 (indek) atau sebesar 95.30%. Indikator ini membandingkan penjumlahan pendapatan total dikurangi DAK dan dibagi dengan total kewajiban ditambah belanja pegawai. Indek Solvabilitas Layanan.

f. **Solvabilitas Operasional**

solvabilitas keuangan dengan target sebesar Rp. 2.200.000,- per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar Rp.2.301.247/org, atau sebesar 104.60 %. Indikator ini membandingkan jumlah total aset tetap dibagi jumlah total penduduk kabupaten Probolinggo.

g. **Solvabilitas Operasional**

Solvabilitas Operasional pada tahun anggaran sebelumnya belum menjadi indikator sasaran BPPKAD, namun tetap menjadi penilaian oleh kememterian dalam negeri.

h. **Prosentase Penilaian Opini BPK**

Prosentase Penilaian Opini BPK pada tahun anggaran sebelumnya belum menjadi indikator sasaran BPPKAD, namun tetap menjadi penilaian oleh kememterian dalam negeri.

i. **Solvabilitas Jangka Panjang**

Solvabilitas Jangka Panjang pada tahun anggaran sebelumnya belum menjadi indikator sasaran BPPKAD, namun tetap menjadi penilaian oleh kememterian dalam negeri.

j. **Solvabilitas Layanan**

Solvabilitas Layanan pada tahun anggaran sebelumnya belum menjadi indikator sasaran BPPKAD, namun tetap menjadi penilaian oleh kememterian dalam negeri.

k. **Solvabilitas Jangka Pendek**

Solvabilitas Jangka Pendek pada tahun anggaran sebelumnya belum menjadi indikator sasaran BPPKAD, namun tetap menjadi penilaian oleh kememterian dalam negeri.

l. **Prosentase Kemandirian keuangan Daerah.**

Indek kemandirian keuangan dengan target sebesar 13.00 (indek) per tahun. Pencapaian s/d triwulan II sebesar 15.52 (indek) atau sebesar 119%. Indikator ini menghitung perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan total dalam APBD.

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan BPPKAD Kabupaten Probolinggo antara lain :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah:

Kurangnya transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen anggaran yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan publik, serta ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang belum optimal.

2. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yang belum Optimal:

Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, pencatatannya kurang rapi, bahkan ada yang terbengkalai, sehingga menghambat potensi pendapatan dan pembangunan.

3. Pemanfaatan PAD yang Belum Optimal:

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kurangnya intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belum maksimalnya pendataan pendapatan lain yang sah, menyebabkan PAD belum berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah.

Tabel 1 - TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Probolinggo

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program /Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Tahun (n)	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	KEUANGAN				525.630.913.642,64	KEUANGAN					553.455.095.980,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Nilai LHE AKIP PD	83.86	12.200.960.649.64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Nilai LHE AKIP PD	83.86	1%	27.245.351.686,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	29.653.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	100 %	614.495.212,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	16.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	538.195.212,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	8.583.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	22.700.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12	4.870.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12	12	53.600.000,00	

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100 %	11.646.339.567	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100 %	100%	17.979.920.111,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	915 org	11.643.793.167	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	915 org	75 org	17.952.920.111,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP	12		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP	12	12 laporan	27.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	4.283.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	1.012.153.104,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	2.043.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	90 org	67.725.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	26	2.240.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	26	24 org	944.428.104,00	

			Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	42.187.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	100 %	704.005.992,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	1.838.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	17	14.987.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	13.570.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	17	87.415.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	590.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	13	20.332.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	3.173.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	10	43.900.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	13.617.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	8	123.999.300,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	14	49.200.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	4.959.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	114	314.171.492,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115	1.438.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115	1	50.000.000,00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	6.185.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	100%	2.252.887.250,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	3	318.750.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan2	0	3	271.250.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	2.680.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit 1Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	2	701.408.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	3.505.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	1	961.479.250,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	447.535.482,64	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	3.682.494.117,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.351.700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	27.752.800,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	10.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	11.692.080,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	434.383.782,64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	3.643.049.237,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	100 %	24.776.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	100 %	100%	999.395.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	17.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	31	574.740.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	4.576.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	8	98.500.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	2.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	14	101.155.900,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	225.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92	512.169.743.988	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92	0	519.921.588.694,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD	100 %	32.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD	100 %	100 %	1.169.143.694,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	216.911.350,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	190.142.144,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	302.407.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	6.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	181.408.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	7.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	5	278.275.100,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Realisasi Penyerapan APBD		27.120.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Realisasi Penyerapan APBD	94.1	94.2	945.286.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	5.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	96.213.600,00	

	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220	1.700.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220	220	16.474.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Probolinggo	“Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)”	2	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Probolinggo	“Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)”	2	2	92.337.600,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	2.130.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12	212.843.000,00	

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	1.770.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	3	176.171.000,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	164	7.520.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	164	162	351.246.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100 %	13.160.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100 %	100%	1.000.694.000,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	860.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	285.600.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	1.900.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	2	218.029.500,00	

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	2.600.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	6	225.350.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	7.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	10	271.714.500,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100 %	512.094.563.988	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100 %	100	516.806.465.000,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	70	483.668.908.988	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	70	325	488.380.810.000,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	1	10.000.000.000,00	

	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	18.425.655.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	1	18.425.655.000,00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	2.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0	0	3.005.699.600,00	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	2.000.000	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	0	0	0	Subk egiat an tidak dipak ai
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	82	699.496.105	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	82	84	3.005.699.600,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	82	699.496.105	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	82	84	3.005.699.600,00	
	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	113.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	133.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87	32.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87	87	32.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87	261	627.038.500,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87	91.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	87	87	91.000.000,00	

								Barang Milik Daerah				
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	194.285.005	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500	500	1.453.450.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	50.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	4	500.000.000,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	169.211.100	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	6	169.211.100,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.4 %	560.712.900	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.4 %	1.4	3.282.456.000,00	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.4 %	560.712.900	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.4 %	1.4	3.282.456.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6	6.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6	13	554.850.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	70	82.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	70	503	390.100.000,00	

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60	8.500.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60	52	372.460.000,00	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	616	108.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	616	5000	377.285.000,00	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	27	124.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	27	12	590.000.000,00	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	84.150.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11	5000	84.150.000,00	
Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	90.062.900	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	102	683.370.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	24	47	230.241.000,00	

Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026

1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Bidang Keuangan

Alokasi anggaran pada bidang keuangan mencapai lebih dari Rp 553,4 miliar. Program penunjang urusan pemerintahan daerah difokuskan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja (LHE AKIP PD) dengan target capaian nilai 83,86. Dari sisi anggaran, terdapat peningkatan kebutuhan dibanding pagu indikatif awal, yaitu sebesar Rp 27,24 miliar.

Beberapa kegiatan utama meliputi:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% tersusunnya dokumen berkualitas.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Koordinasi RKA, dan Laporan Kinerja SKPD, seluruhnya ditargetkan sesuai standar output (7–12 dokumen).
- Administrasi Keuangan dan Kepegawaian, serta penyediaan gaji/tunjangan ASN, dengan alokasi terbesar, mencapai hampir Rp 18 miliar.
- Pengadaan sarana kantor dan logistik (pakaian dinas, peralatan kantor, instalasi listrik, perlengkapan rumah tangga, cetakan, bahan logistik, dsb.) dengan peningkatan signifikan dibanding tahun berjalan.
- Pemeliharaan BMD dan jasa operasional kantor juga mendapat alokasi yang lebih besar untuk menjamin dukungan operasional pemerintahan.

Kebutuhan riil di lapangan lebih tinggi dibandingkan pagu awal, khususnya untuk pengadaan pakaian dinas, rapat koordinasi, dan pemeliharaan sarana prasarana.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan target capaian 92%. Pagu indikatif awal sebesar Rp 512,1 miliar, meningkat menjadi Rp 519,9 miliar pada analisis kebutuhan.

Fokus kegiatan meliputi:

- Ketepatan waktu penyusunan APBD dan P-APBD (target 100%).
- Dokumen KUA, PPAS, regulasi APBD, perubahan APBD, serta dokumen teknis anggaran ditargetkan sesuai standar (2–5 dokumen).
- Realisasi penyerapan APBD ditargetkan 94,1%.
- Koordinasi pengelolaan kas daerah, laporan realisasi kas, rekonsiliasi SP2D, konsolidasi laporan SKPD/BLUD, serta pembinaan akuntansi seluruhnya tetap menjadi prioritas.
- Penyaluran dana bantuan keuangan, dana bagi hasil, dan dana tidak terduga tetap diupayakan 100%.

Kebutuhan dana lebih tinggi terjadi pada subkegiatan analisis penyaluran bantuan keuangan serta penerapan sistem informasi keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Target utama adalah peningkatan Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) menjadi 82–84. Pagu indikatif awal sebesar Rp 699 juta meningkat menjadi Rp 3 miliar.

Kegiatan mencakup:

- Penyusunan standar harga dan perencanaan kebutuhan BMD (87 dokumen).
- Inventarisasi, penatausahaan, pengamanan, penilaian, serta optimalisasi pemanfaatan aset.
- Pengelolaan aset daerah secara tertib oleh SKPD, ditargetkan 82% dengan realisasi yang diharapkan mencapai 84%.

Kebutuhan riil lebih tinggi, khususnya untuk kegiatan inventarisasi, pengamanan, serta penilaian aset.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target utama adalah peningkatan PAD sebesar 1,4% dengan pagu indikatif awal Rp 560,7 juta meningkat menjadi Rp 3,28 miliar.

Kegiatan meliputi:

- Penyediaan sarana prasarana pengelolaan pajak daerah (6–13 unit).
- Pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak (70–503 laporan).
- Penilaian NJOP PBB-P2 dan BPHTB, penetapan wajib pajak, serta pelayanan konsultasi pajak dengan cakupan lebih luas.
- Penagihan pajak dan pembinaan retribusi daerah juga mendapat alokasi tambahan.

Kebutuhan anggaran lebih tinggi pada kegiatan pelayanan konsultasi pajak, verifikasi data pelaporan, dan penagihan, menyesuaikan beban kerja di lapangan.

Kesimpulan Review RKPD 2026

1. Hampir seluruh program/kegiatan mempertahankan target kinerja 100% untuk dokumen, laporan, dan indikator tata kelola keuangan.
2. Kebutuhan riil pada hampir semua program/kegiatan jauh lebih besar dari pagu indikatif awal, mencerminkan adanya gap antara perencanaan awal dan kebutuhan faktual.
3. Bidang dengan lonjakan kebutuhan tertinggi adalah pengelolaan keuangan daerah, pemeliharaan aset daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah.
4. Catatan strategis: diperlukan penyesuaian anggaran agar target kinerja tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas layanan dan akuntabilitas keuangan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap proposal atau inisiatif yang diajukan oleh kelompok

masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan pembangunan daerah, serta potensi dampak dan kelayakannya. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa usulan tersebut dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program/kegiatan/subkegiatan di BPPKAD yang mengakomodir usulan masyarakat adalah subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Ketiga subkegiatan melekat di BPPKAD namun sifatnya hanya sebatas pendelegasian dokumen saja, selanjutnya adalah kewenangan dinas PMD dalam realisasi dan monevnya. Dalam subkegiatan ini menampung Kegiatan POKIR, DD, ADD, BTT dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, berikut tabel data penjelasannya;

TABEL T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Probolinggo

NO.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	KEUANGAN				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	325 Desa 5 Kelurahan	1. DD 2. ADD 3. POKIR 4. TT 5. DBH Pajak 6. DBH Retribusi
	KEGIATAN Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil	325 Desa 5 Kelurahan	1. DD 2. ADD 3. POKIR 4. TT 5. DBH Pajak 6. DBH Retribusi
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325 Desa 5 Kelurahan	1. DD 2. ADD 3. POKIR
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	1. TT
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	325 Desa 5 Kelurahan	1. DBH Pajak 2. DBH Retribusi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT BPPKAD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif" Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif antara lain :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif. Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan target. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel. Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggung-jawabkan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif. Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Probolinggo adalah "Probolinggo Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" untuk periode

2025-2045. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing" atau yang disingkat "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang SAE". Visi ini menjadi landasan pembangunan lima tahun ke depan, yang kemudian dijabarkan melalui misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo, maka peran dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo terletak pada;

Misi 1 (satu) yakni " SAE PEMERINTAHAN, dengan menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif". Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Secara rinci tujuan dan sasaran dapat diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel .3.2.2
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR serta TARGET KINERJA BPPKAD
Tahun 2025 s/ d 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah											
Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik Yang Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas		Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	70	71	72	73	74	75	76	
	TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)	1	1	1.5	2	3	3.50	4	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	70	100	100	100	100	100	100	
			Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%)	60	70	75	80	90	95	100	
			Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Prosentase Penyerapan Anggaran (%)	87	92	92.5	93	93.5	94	95	
			Fleksibilitas Keuangan (%)	2	2.02	2.05	2.07	2.09	2.15	2.19	
			Solvabilitas Operasional (%)	81.80	81.9	82	82.1	82.2	82.3	82.4	
			Persentase Penilaian Opini BPK (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Solvabilitas Jangka Panjang (%)	0	15.69	7	51.63	290	84	101	
			Solvabilitas Layanan (Rp/org)	2286321.23	2301246.61	2488165.39	2330768.19	2198595.71	2086263.17	1989822.11	
			Solvabilitas Jangka Pendek (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%)	14	16.31	17.33	18.35	19.37	20	20.39	

TABEL T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Probolinggo

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Probolinggo				Pagu/pendanaan tahun 2026 berdasarkan KUAPPAS 2026 - Pagu/pendanaan tahun 2027 berdasarkan Tabel Renstra 2027(SIPD BANGDA)		
5	02				KEUANGAN		Probolinggo		553.455.095.980,00	DAU			541.468.745.229
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	Probolinggo		27.245.351.686,00	DAU			12.336.600.000
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	Probolinggo	100%	614.495.212,00	DAU		100%	29.800.000
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Probolinggo	7	538.195.212,00	DAU		7	16.300.000
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Probolinggo	3	22.700.000,00	DAU		3	8.600.000

5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Probolinggo	12	53.600.000,00	DAU		12	4.900.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Probolinggo	100%	17.979.920.111,00	DAU		100%	11.646.483.167
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Probolinggo	915	17.952.920.111,00	DAU		917	11.643.893.167
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP	Probolinggo	12	27.000.000,00	DAU		12	2.600.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Probolinggo	100%	1.012.153.104,00	DAU		100%	4.400.000
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Probolinggo	92	67.725.000,00	DAU		93	2.100.000
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Probolinggo	26	944.428.104,00	DAU		27	2.300.000

5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Probolinggo	100%	704.005.992,00	DAU		100%	42.400.000
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Probolinggo	13	14.987.400,00	DAU		14	1.850.000
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Probolinggo	7	87.415.800,00	DAU		8	13.600.000
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Probolinggo	5	20.332.000,00	DAU		6	600.000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Probolinggo	5	43.900.000,00	DAU		6	3.200.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Probolinggo	7	123.999.300,00	DAU		8	13.650.000
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Probolinggo	7	49.200.000,00	DAU		8	3.050.000
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Probolinggo	37	314.171.492,00	DAU		40	5.000.000
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Probolinggo	115	50.000.000,00	DAU		120	1.450.000

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Probolinggo		2.252.887.250,00	DAU			6.250.000
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Probolinggo	0	318.750.000,00	DAU		0	0
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Probolinggo	0	271.250.000,00	DAU		0	0
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Probolinggo	4	701.408.000,00	DAU		5	2.700.000
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Probolinggo	6	961.479.250,00	DAU		7	3.550.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Probolinggo	100%	3.682.494.117,00	DAU		100%	582.306.833
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Probolinggo	12	27.752.800,00	DAU		12	2.400.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Probolinggo	12	11.692.080,00	DAU		12	1.810.000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Probolinggo	12	3.643.049.237,00	DAU		12	578.096.833

5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	Probolinggo	100%	999.395.900,00	DAU		100%	24.950.000
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Probolinggo	22	574.740.000,00	DAU		23	17.050.000
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Probolinggo	11	98.500.000,00	DAU		12	4.600.000
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Probolinggo	7	101.155.900,00	DAU		8	2.400.000
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Probolinggo	1	225.000.000,00	DAU		1	900.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Probolinggo	92	519.921.588.694,00	DAU		94	527.857.845.229
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD	Probolinggo		1.169.143.694,00	DAU			
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Probolinggo	2	216.911.350,00	DAU		2	5.000.000

5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Probolinggo	2	190.142.144,00	DAU		2	7.200.000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Probolinggo	2	302.407.100,00	DAU		2	8.500.000
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Probolinggo	2	181.408.000,00	DAU		2	6.200.000
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Probolinggo	5	278.275.100,00	DAU		5	7.900.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan APBD	Probolinggo		945.286.000,00	DAU			28.050.000
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Probolinggo	12	96.213.600,00	DAU		12	5.500.000
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Probolinggo	220	16.474.800,00	DAU		220	1.800.000

5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	“Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)”	Probolinggo	2	92.337.600,00	DAU		2	9.300.000
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Probolinggo	12	212.843.000,00	DAU		12	2.140.000
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Probolinggo	5	176.171.000,00	DAU		6	1.780.000

5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Probolinggo	164	351.246.000,00	DAU		165	7.530.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	Probolinggo	100%	1.000.694.000,00	DAU		100%	13.470.000
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Probolinggo	2	285.600.000,00	DAU		2	870.000
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Probolinggo	2	218.029.500,00	DAU		2	2.000.000
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Probolinggo	6	225.350.000,00	DAU		6	2.700.000

5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Probolinggo	10	271.714.500,00	DAU		10	7.900.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	Probolinggo	100%	516.806.465.000,00	DAU		100%	527.779.525.229
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Probolinggo	70	488.380.810.000,00	DAU		71	498.853.870.229
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Probolinggo	3	10.000.000.000,00	DAU		4	10.500.000
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Probolinggo	12	18.425.655.000,00	DAU		12	18.425655.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Probolinggo	82	3.005.699.600,00	DAU		84	707.300.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	Probolinggo	82	3.005.699.600,000	DAU		84	707.300.000

5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Probolinggo	1	3.005.699.600,00	DAU		1	113.000.000
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Probolinggo	87	3.005.699.600,00	DAU		87	32.000.000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Probolinggo	87	133.000.000,00	DAU		87	50.000.000
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Probolinggo	87	32.000.000,00	DAU		87	91.000.000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Probolinggo	5	627.038.500,00	DAU		6	202.088.900
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Probolinggo	5	91.000.000,00	DAU		6	50.000.000
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Probolinggo	6	1.453.450.000,00	DAU		6	169.211.100
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Probolinggo	1.4%	500.000.000,00	DAU		1.4%	567.000.000
5	02	04	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Probolinggo	1.4%	169.211.100,00	DAU		1.4%	567.000.000

5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Probolinggo	6	3.282.456.000,00	DAU		7	10.000.000
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Probolinggo	70	3.282.456.000,00	DAU		80	85.000.000
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Probolinggo	60	554.850.000,00	DAU		65	7.000.000
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Probolinggo	616	390.100.000,00	DAU		616	100.000.000
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Probolinggo	27	372.460.000,00	DAU		28	125.000.000
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Probolinggo	11	553.455.095.980,00	DAU		11	84.150.000
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Probolinggo	100	27.245.351.686,00	DAU		100	81.850.000
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Probolinggo	24	614.495.212,00	DAU		24	65.000.000

Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo 2026–2027

1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Bidang Keuangan)

Total kebutuhan anggaran untuk unsur penunjang pada tahun 2026 mencapai Rp 553,45 miliar, dengan sumber dana utama berasal dari DAU. Tahun 2027, prakiraan kebutuhan sebesar Rp 541,46 miliar.

Fokus utama diarahkan pada:

- 1) Penyusunan SAKIP, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% dokumen tersusun berkualitas.
- 2) Administrasi keuangan, khususnya penyediaan gaji dan tunjangan bagi 915 ASN pada 2026 dan meningkat menjadi 917 ASN pada 2027.
- 3) Administrasi kepegawaian, termasuk pengadaan pakaian dinas, pelatihan pegawai, serta pemenuhan administrasi pegawai.
- 4) Administrasi umum perangkat daerah, seperti penyediaan sarana kantor, barang cetakan, logistik, arsip dinamis, rapat koordinasi, hingga kunjungan tamu.
- 5) Pengadaan dan pemeliharaan aset penunjang, meliputi kendaraan dinas, peralatan kantor, serta sarana gedung.
- 6) Penyediaan jasa penunjang, yaitu jasa komunikasi, surat-menyurat, pelayanan umum kantor, serta pemeliharaan kendaraan dan sarana kantor.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini menjadi inti BPPKAD, dengan alokasi Rp 519,92 miliar (2026) dan prakiraan Rp 527,85 miliar (2027).

Sasaran utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan target capaian 92% di 2026 dan 94% di 2027.

Kegiatan utama meliputi:

- 1) Koordinasi dan penyusunan APBD, KUA-PPAS, perubahan APBD, serta regulasi bidang anggaran.
- 2) Pengelolaan kas daerah, penyusunan SPD, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, hingga rekonsiliasi SP2D dengan instansi terkait.
- 3) Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, termasuk konsolidasi laporan SKPD/BLUD, pertanggungjawaban APBD, serta rekonsiliasi akun.
- 4) Penyaluran dana bantuan keuangan, dana darurat, dana bagi hasil, dan dana tidak terduga, dengan target 100% tersalurkan tepat waktu.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Dialokasikan sebesar Rp 3,0 miliar (2026) dan menurun menjadi Rp 707 juta (2027). Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) dengan target 82 pada 2026 dan meningkat menjadi 84 pada 2027.

Kegiatan meliputi:

- 1) Penyusunan standar harga dan perencanaan kebutuhan BMD.

- 2) Penatausahaan, inventarisasi, dan pengamanan aset.
- 3) Penilaian BMD serta optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target pertumbuhan 1,4% per tahun. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 500 juta (2026) dan meningkat menjadi Rp 567 juta (2027).

Kegiatan yang direncanakan meliputi:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak.
- 2) Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak.
- 3) Penilaian PBB-P2 dan BPHTB.
- 4) Penetapan wajib pajak, pelayanan konsultasi, penelitian/verifikasi data, hingga penagihan pajak.
- 5) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak serta retribusi daerah.

Kesimpulan Narasi ;

1. Tahun 2026–2027, BPPKAD Kabupaten Probolinggo fokus pada 4 domain strategis: dukungan administrasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengelolaan PAD.
2. Seluruh indikator capaian ditargetkan 100% dengan penguatan khusus pada akuntabilitas keuangan dan optimalisasi PAD.
3. Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara pagu 2026 dan prakiraan 2027 (beberapa menurun drastis), arah kebijakan tetap pada efisiensi belanja, peningkatan tertib aset, dan optimalisasi pendapatan daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Tahun 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana kerja berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Akhir Renja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD TAHUN 2026

KODE REKENING					Uraian	Sum ber Dan a	Lokasi		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5.02.0.00.0.00.04.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah									Rp34.395.825.730,00	Rp2.252.805.250,00	Rp10.000.000.000,00	Rp506.806.465.000,00	Rp553.455.095.980,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp34.395.825.730,00	Rp2.252.805.250,00	Rp10.000.000.000,00	Rp506.806.465.000,00	Rp553.455.095.980,00	
5	02				KEUANGAN				Rp34.395.825.730,00	Rp2.252.805.250,00	Rp10.000.000.000,00	Rp506.806.465.000,00	Rp553.455.095.980,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp25.407.546.436,00	Rp1.837.805.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.245.351.686,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp574.495.212,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp614.495.212,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Probolinggo		Rp538.195.212,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp538.195.212,00	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Probolinggo		Rp22.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.700.000,00	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Probolinggo		Rp13.600.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.600.000,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp17.979.920.111,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.979.920.111,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Probolinggo		Rp17.952.920.111,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.952.920.111,00	
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kab. Probolinggo		Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.000.000,00	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp1.012.153.104,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.012.153.104,00	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas		Kab. Probolinggo		Rp67.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.725.000,00	

					beserta Atribut Kelengkapannya									
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Probolinggo		Rp944.428.104,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp944.428.104,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp704.005.992,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.005.992,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Probolinggo		Rp14.987.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.987.400,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Probolinggo		Rp87.415.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.415.800,00	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Probolinggo		Rp20.332.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.332.000,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Probolinggo		Rp43.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.900.000,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Probolinggo		Rp123.999.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.999.300,00	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Probolinggo		Rp49.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.200.000,00	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Probolinggo		Rp314.171.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.171.492,00	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Probolinggo		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp455.082.000,00	Rp1.797.805.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.252.887.250,00	

5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau		Kab. Probolinggo		Rp0,00	Rp318.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp318.750.000,00	
---	----	----	------	------	---	--	------------------	--	--------	------------------	--------	--------	------------------	--

					Kendaraan Dinas Jabatan									
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Probolinggo		Rp0,00	Rp271.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp271.250.000,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Probolinggo		Rp7.450.000,00	Rp693.958.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp701.408.000,00	
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Probolinggo		Rp447.632.000,00	Rp513.847.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp961.479.250,00	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp3.682.494.117,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.682.494.117,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Probolinggo		Rp27.752.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.752.800,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Probolinggo		Rp11.692.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.692.080,00	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Probolinggo		Rp3.643.049.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.643.049.237,00	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp999.395.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.395.900,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Probolinggo		Rp574.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp574.740.000,00	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Probolinggo		Rp98.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.500.000,00	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Probolinggo		Rp101.155.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.155.900,00	

5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Probolinggo	Rp225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rp3.015.123.694,00	Rp100.000.000,00	Rp10.000.000.000,00	Rp506.806.465.000,00	Rp519.921.588.694,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Rp1.169.143.694,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.169.143.694,00
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Probolinggo	Rp216.911.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.911.350,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Probolinggo	Rp190.142.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.142.144,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Probolinggo	Rp302.407.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.407.100,00
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Probolinggo	Rp181.408.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.408.000,00
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Probolinggo	Rp278.275.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.275.100,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Rp845.286.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.286.000,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Probolinggo	Rp96.213.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.213.600,00
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Probolinggo	Rp16.474.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.474.800,00

5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran		Kab. Probolinggo		Rp92.337.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.337.600,00	
---	----	----	------	------	---	--	------------------	--	-----------------	--------	--------	--------	-----------------	--

					Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Kab. Probolinggo							
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Kab. Probolinggo		Rp212.843.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.843.000,00	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Kab. Probolinggo		Rp76.171.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.171.000,00	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Probolinggo		Rp351.246.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.246.000,00	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Rp1.000.694.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.694.000,00	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Kab. Probolinggo		Rp285.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.600.000,00	

5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Kab. Probolinggo		Rp218.029.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.029.500,00	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Probolinggo		Rp225.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.350.000,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Kab. Probolinggo		Rp271.714.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp271.714.500,00	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000.000,00	Rp506.806.465.000,00	Rp516.806.465.000,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Kab. Probolinggo		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp488.380.810.000,00	Rp488.380.810.000,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Kab. Probolinggo		Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000.000,00	

							Kab. Probolinggo							
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Kab. Probolinggo		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.425.655.000,00	Rp18.425.655.000,00	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Rp2.950.699.600,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.005.699.600,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp2.950.699.600,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.005.699.600,00	

5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga		Kab. Probolinggo		Rp133.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.000.000,00	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kab. Probolinggo		Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.000.000,00	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Kab. Probolinggo		Rp572.038.500,00	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp627.038.500,00	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Kab. Probolinggo		Rp91.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.000.000,00	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah		Kab. Probolinggo		Rp1.453.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.453.450.000,00	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah		Kab. Probolinggo		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Kab. Probolinggo		Rp169.211.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.211.100,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Kab. Probolinggo		Rp3.022.456.000,00	Rp260.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.282.456.000,00	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kab. Probolinggo		Rp3.022.456.000,00	Rp260.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.282.456.000,00	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Kab. Probolinggo		Rp294.850.000,00	Rp260.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.850.000,00	

5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Kab. Probolinggo		Rp390.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.100.000,00	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan		Kab. Probolinggo		Rp372.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.460.000,00	

					Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Kab. Probolinggo		Rp377.285.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp377.285.000,00	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Kab. Probolinggo		Rp590.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp590.000.000,00	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Kab. Probolinggo		Rp84.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.150.000,00	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah		Kab. Probolinggo		Rp683.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp683.370.000,00	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kab. Probolinggo		Rp230.241.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.241.000,00	

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo pada Tahun Anggaran 2026 merencanakan total belanja sebesar Rp553.455.095.980,00. Belanja tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen, yakni belanja operasi sebesar Rp34.395.825.730,00, belanja modal sebesar Rp2.252.805.250,00, belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp506.806.465.000,00.

Jika ditinjau berdasarkan program, terdapat empat program utama yang menjadi pilar pengelolaan keuangan dan aset daerah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini menyerap anggaran sebesar Rp27.245.351.686,00, dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp25,40 miliar dan belanja modal Rp1,83 miliar. Fokus belanja diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, administrasi keuangan dan kepegawaian, penyediaan sarana pendukung administrasi umum, serta pengadaan barang milik daerah. Kegiatan terbesar adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi Rp17,95 miliar, disertai dukungan kegiatan lain seperti koordinasi laporan keuangan, penyediaan logistik, cetakan, pakaian dinas, hingga fasilitasi kunjungan tamu.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Merupakan program dengan porsi anggaran terbesar setelah transfer, yakni Rp519.921.588.694,00, termasuk belanja operasi Rp3,01 miliar, belanja modal Rp100 juta, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp506,8 miliar. Program ini mencakup koordinasi penyusunan APBD, pengelolaan perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyaluran bantuan keuangan, dana bagi hasil, dan dana darurat. Komponen terbesar dari program ini adalah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar Rp488,38 miliar, yang didukung dengan belanja penyaluran dana bagi hasil dan pengelolaan dana darurat.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp3.005.699.600,00, terdiri dari belanja operasi Rp2,95 miliar dan belanja modal Rp55 juta. Program ini diarahkan pada penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, serta optimalisasi pemanfaatan BMD. Kegiatan terbesar terdapat pada pengamanan barang milik daerah dengan alokasi Rp1,45 miliar, serta dukungan belanja untuk penatausahaan, penyusunan standar harga, dan optimalisasi penggunaan aset daerah.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Total anggaran sebesar Rp3.282.456.000,00 terdiri dari belanja operasi Rp3,02 miliar dan belanja modal Rp260 juta. Program ini difokuskan untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penyediaan sarana prasarana pengelolaan pajak, pengolahan basis data pajak, pelayanan dan konsultasi pajak, penilaian objek pajak, serta penagihan pajak daerah. Porsi terbesar dialokasikan pada kegiatan penagihan pajak daerah sebesar Rp683,37 juta, serta pengadaan sarana prasarana pengelolaan pajak sebesar Rp554,85 juta.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, belanja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 menunjukkan fokus utama pada:

- Transfer keuangan daerah (Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Dana Darurat) yang mencapai lebih dari 90% total belanja,
- Belanja operasi rutin untuk mendukung administrasi keuangan, kepegawaian, dan pelayanan umum perangkat daerah,
- Belanja modal terbatas untuk sarana prasarana pendukung kantor dan pengelolaan aset.

Dengan komposisi tersebut, arah kebijakan BPPKAD tahun 2026 menekankan pada penguatan fungsi keuangan daerah, optimalisasi PAD, serta penataan pengelolaan aset daerah secara akuntabel dan transparan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo ini disusun memperhatikan penyusunan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026, Rencana Kerja memperhatikan dari pemerintah pusat. Sehingga Perangkat Daerah akan tepat sasaran selaras menjalankan program kegiatannya dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah satu tahun kedepan.

Untuk mewujudkan pencapaian target dari indicator kinerja BPPKAD, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja (Renja) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan Perangkat Daerah, dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

PROBOLINGGO, **21 Agustus 2025**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199302 2 002